

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang yang lain. Fakta membuktikan bahwa pandemi Covid-19 memberi dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan pendapatan nasional, serta peningkatan belanja dan pembiayaan nasional (Juliani, 2020). Dampak sosial dan ekonomi yang terjadi sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat penerapan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat sehingga menghambat kegiatan ekonomi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memberi bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak guna meringankan beban yang dialami dan untuk menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi terus berjalan.

Dengan meningkatnya dampak Covid-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap APBN dan APBD tahun anggaran 2020 (NTT, 2020). Pemerintah melakukan *refocusing* anggaran guna mempercepat pemulihan dampak yang diakibatkan oleh Covid-19. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran (2020) “struktur Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) tahun 2020

diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta dampak berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang berfokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian”. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam penanganan kondisi darurat akibat Covid-19, karena upaya penanganan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja (Ariyanto, 2020). Pemda sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran strategis dalam mengatasi pandemi Covid-19. Realokasi anggaran di pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/KMK.07/2020 mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam keputusan tersebut, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja dengan merasionalisasikan belanja pemerintah daerah (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020). Jenis belanja yang mendapatkan prioritas anggaran dalam penyesuaian tersebut yaitu belanja bantuan sosial berupa penyediaan jaring pengamanan sosial melalui pemberian bantuan sosial.

Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang diterapkan pemerintah daerah salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat (Humaidi, 2020). Belanja bantuan sosial menjadi salah satu pos belanja pemerintah yang perlu dilakukan penyesuaian akibat pandemi. Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 19 belanja bantuan sosial adalah “transfer uang atau barang/jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.” (Buletin Teknis SAP Nomor 19). Bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja yang setiap tahunnya dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh entitas akuntansi atau pelaporan yang bersangkutan.

Pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta juga perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja bantuan sosial. Penanganan Covid-19 DIY didistribusikan ke setiap bidang. Dari anggaran sekitar Rp 300 miliar diperoleh dengan menggeser puluhan proyek fisik yang dapat dibatalkan dalam waktu setahun, terutama proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID), termasuk juga anggaran perjalanan dinas, serta kegiatan berkumpul seperti bimtek, dan pelatihan (DIY, 2020).

Berdasarkan APBD-P tahun 2020 anggaran belanja bantuan sosial di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu senilai Rp32.131.465.000,00, Pemerintah Kabupaten Sleman senilai Rp64.839.000.000,00, kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul senilai Rp2.835.000.000, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Rp2.637.000.000,00, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo senilai Rp20.040.000.000,00. Terdapat perbedaan penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta. Akibat pandemi yang terjadi, terdapat anggaran belanja bantuan sosial di kabupaten atau kota yang naik, tetap, bahkan turun.

Permasalahan terkait penganggaran dan pelaksanaan dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial. Dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial, pemerintah perlu melaksanakan pengelolaan

keuangan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian antara penerapan akuntansi belanja bantuan sosial dengan aturan-aturan yang terkait untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan anggaran daerah.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Riau pada masa pandemi. Rahmatika (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi penerapan akuntansi belanja bantuan sosial Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2020.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah perlakuan akuntansi atas belanja bantuan sosial di pemerintah daerah. Fokus utama Penulis yaitu penerapan akuntansi belanja bantuan sosial yang dilaksanakan oleh tiap-tiap pemerintah daerah di Provinsi DIY dalam merealisasikan anggaran atas penggunaan APBD. Hal ini perlu ditinjau mengingat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 yang menjadi dasar bagaimana pelaksanaan belanja termasuk belanja bantuan sosial di masa pandemi. Oleh karena itu, Penulis akan melaksanakan Tinjauan Penerapan Akuntansi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Pandemi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penulisan, maka dapat diambil pokok permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak pandemi terhadap belanja bantuan sosial pada tiap-tiap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan akuntansi belanja bantuan sosial pada tiap-tiap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial pada tiap-tiap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat pandemi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dampak pandemi terhadap belanja bantuan sosial pada tiap-tiap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. untuk mengetahui perbandingan penerapan akuntansi belanja bantuan sosial pada tiap-tiap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta,
3. untuk mengetahui penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial pada tiap-tiap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat pandemi.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penyusunan karya tulis ini yaitu membandingkan penerapan akuntansi belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020. Perbandingan penerapan akuntansi yang dilakukan terkait dengan perlakuan akuntansi pos belanja bantuan sosial yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapannya di Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu,

penulis juga membandingkan penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akibat pandemi.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) mengenai tinjauan atas perbandingan penerapan akuntansi belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan penulis antara lain sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan akuntansi belanja bantuan sosial di pemerintah daerah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi belanja bantuan sosial yang telah dipelajari di jenjang perkuliahan.

##### b. Bagi Pemerintah Daerah di Yogyakarta

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penerapan akuntansi belanja bantuan sosial oleh pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum terkait penulisan yang akan dilakukan. Penjelasan pada bab ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, dan tujuan penulisan yang hendak dicapai. Selain itu, penulis juga menguraikan ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan yang berkaitan dengan topik karya tulis. Uraian tersebut meliputi aturan-aturan terkait penerapan akuntansi belanja bantuan sosial di pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga akan menguraikan aturan terkait penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial di pemerintah daerah.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam membandingkan penerapan akuntansi belanja sosial yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan terkait. Selain itu, penulis akan membahas gambaran umum objek Karya Tulis Tugas Akhir dan membandingkan data terkait belanja bantuan sosial di tiap-tiap pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020. Penulis juga akan membandingkan penyesuaian yang dilakukan atas anggaran belanja bantuan sosial di tiap-tiap pemerintah daerah di Yogyakarta akibat pandemi.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memberikan simpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dijelaskan penulis pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang disampaikan berupa kesimpulan atas hasil perbandingan penerapan akuntansi belanja bantuan sosial yang meliputi penyajian dan pengungkapan, serta perbandingan atas penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial di tiap-tiap pemerintah daerah di Yogyakarta.